

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak jalanan adalah anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya beraktivitas di area umum atau tempat terbuka, bukan di rumah ataupun di lingkungan sekolah, serta bertahan hidup dengan melakukan berbagai aktivitas ekonomi informal seperti mengamen, berjualan asongan, atau pekerjaan lainnya di jalanan (Buana, 2025). Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar anak jalanan kehilangan akses terhadap pendidikan formal, mengalami keterbatasan perlindungan sosial, serta rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi sosial. Kondisi tersebut menegaskan bahwa fenomena anak jalanan tidak sekadar menyangkut persoalan pribadi, tetapi merupakan isu sosial yang rumit dan saling terkait dengan berbagai dimensi dalam kehidupan bermasyarakat.

Fenomena anak jalanan muncul akibat kombinasi berbagai faktor struktural dan situasional. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama yang mendorong anak berada dalam kondisi kemiskinan sehingga anak didorong untuk turut membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain faktor ekonomi, faktor sosial dan keluarga seperti disfungsi keluarga, kurangnya perhatian orang tua, konflik rumah tangga, maupun kondisi keluarga yang tidak stabil juga turut memengaruhi munculnya fenomena anak jalanan (Armita, 2016). Faktor pendidikan juga menjadi aspek penting yang mendorong anak keluar dari sistem pendidikan formal, misalnya karena ketidakmampuan keluarga membiayai

pendidikan atau rendahnya kualitas akses pendidikan di lingkungan tempat tinggal. Selain itu, lingkungan sosial seperti pengaruh teman sebaya, norma sosial di lingkungan sekitar, serta mobilitas urban turut memperkuat pola kehidupan anak di jalanan (Armita, 2016).

Fenomena anak jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi perhatian pada tingkat nasional karena berkaitan dengan pemenuhan hak anak dalam aspek pendidikan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan anak. Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Sosial Republik Indonesia menyampaikan bahwa masih terdapat jutaan anak usia sekolah yang berada di luar sistem pendidikan formal, baik karena tidak pernah sekolah maupun mengalami putus sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan masih menjadi tantangan pada tingkat nasional. Selain itu, berdasarkan data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) per 15 Desember 2020, jumlah anak terlantar di Indonesia tercatat mencapai 67.368 anak. Meskipun kategori anak terlantar tidak sepenuhnya sama dengan anak jalanan, data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok anak yang berada dalam kondisi rentan sosial dan membutuhkan perlindungan serta intervensi kesejahteraan dalam pemberdayaan pendidikan nonformal khususnya. Fenomena anak jalanan juga terdapat di salah satu Provinsi yakni Provinsi Jawa Timur. Provinsi ini merupakan wilayah dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, berpotensi memunculkan terhadap permasalahan sosial, termasuk keberadaan anak jalanan. Berikut merupakan data terkait jumlah anak

jalanman yang tercatat di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 2025, dilampirkan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Anak Jalanman di Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah (2025)
1	Kab. Pacitan	3
2	Kab. Ponorogo	43
3	Kab. Trenggalek	5
4	Kab. Tulungagung	5
5	Kab. Blitar	15
6	Kab. Kediri	44
7	Kab. Malang	35
8	Kab. Lumajang	28
9	Kab. Jember	53
10	Kab. Banyuwangi	5
11	Kab. Bondowoso	30
12	Kab. Situbondo	4
13	Kab. Probolinggo	33
14	Kab. Pasuruan	15
15	Kab. Sidoarjo	74
16	Kab. Mojokerto	24
17	Kab. Jombang	20
18	Kab. Nganjuk	22
19	Kab. Madiun	18
20	Kab. Magetan	8
21	Kab. Ngawi	4
22	Kab. Bojonegoro	17
23	Kab. Tuban	20
24	Kab. Lamongan	41
25	Kab. Gresik	35
26	Kab. Bangkalan	6
27	Kab. Sampang	26
28	Kab. Pamekasan	9
29	Kab. Sumenep	12
30	Kota Blitar	4
31	Kota Malang	24
32	Kota Probolinggo	4
33	Kota Pasuruan	2
34	Kota Mojokerto	12
35	Kota Madiun	6
36	Kota Surabaya	30
37	Kota Batu	5
38	Kota Kediri	10

Sumber: (Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, 2025)

Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2025 pada tabel 1.1, jumlah anak jalanan yang tercatat di seluruh kabupaten dan kota menyentuh angka 715 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa fenomena anak jalanan masih tersebar di berbagai wilayah di Jawa Timur dengan jumlah yang bervariasi pada setiap daerah. Kabupaten Sidoarjo tercatat sebagai wilayah dengan jumlah anak jalanan tertinggi yaitu 74 anak, diikuti oleh Kabupaten Jember sebanyak 53 anak dan Kabupaten Kediri sebanyak 44 anak. Sebaliknya, persebaran dengan intensitas terendah tercatat di Kota Pasuruan dan Kabupaten Pacitan, disusul oleh Kota Blitar dan Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Situbondo (masing-masing 4 jiwa). Perbedaan jumlah anak jalanan di setiap daerah tersebut menunjukkan bahwa permasalahan anak jalanan masih menjadi isu sosial yang cukup kompleks di Provinsi Jawa Timur. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi keluarga, tingkat urbanisasi, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, permasalahan anak jalanan memerlukan perhatian dan penanganan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah maupun berbagai lembaga sosial yang bergerak dalam bidang perlindungan dan pemberdayaan anak.

Fenomena tersebut juga terlihat di beberapa wilayah perkotaan yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan mobilitas penduduk, seperti Surabaya, Malang, dan Sidoarjo. Keberadaan anak jalanan di wilayah tersebut diengaruhi oleh berbagai faktor antaranya kemiskinan keluarga, kerentanan sosial keluarga, serta lingkungan masyarakat yang tidak mendukung perkembangan anak

(Mugianti, Winarni, & Pangestuti, 2018). Salah satu daerah yang masih menghadapi persoalan anak jalanan adalah Kabupaten Sidoarjo. Pada tingkat daerah, Kabupaten Sidoarjo masih menunjukkan keberadaan anak jalanan yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Untuk mengetahui jumlah anak jalanan di Kabupaten Sidoarjo, telaah terhadap data *time-series* mutlak diperlukan. Adapun data jumlah anak Kabupaten Sidoarjo tahun 2024-2025 menurut sumber data Dinas Sosial Sidoarjo dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Data Dinas Sosial Kab Sidoarjo 2023-2025

2023	90 anak
2024	82 anak
2025	74 anak

Sumber: (Dinas Sosial Sidoarjo, 2023-2025)

Berdasarkan data pada tabel 1.2, menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan di Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2023-2025 mengalami perubahan yang fluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2023 teridentifikasi sebanyak 90 anak, yang kemudian menurun menjadi 82 pada tahun 2024, dan kembali menyusut hingga 74 anak pada tahun 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami penurunan, keberadaan anak jalanan di Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya terselesaikan dan masih membutuhkan atensi dari segenap pihak terkait. Kondisi ini juga diperkuat oleh adanya komunitas sosial seperti *Save Street Children* (SSC) Sidoarjo yang melakukan pendampingan terhadap anak jalanan melalui kegiatan pendidikan nonformal dan pembinaan sosial. Berdasarkan data SSC, terdapat puluhan anak jalanan yang menjadi sasaran program pembinaan di beberapa titik wilayah Sidoarjo, sehingga menunjukkan

bahwa masih terdapat anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan dan pendampingan. Artinya, keberadaan program pemberdayaan melalui fasilitasi pendidikan nonformal menjadi penting sebagai upaya untuk merekonstruksi kualitas hidup dan membuka peluang perbaikan masa depan bagi anak-anak jalanan di wilayah tersebut.

Keberadaan anak jalanan yang masih ditemukan di berbagai wilayah menunjukkan bahwa penanganan permasalahan tersebut tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Dalam konteks ini, *Save Street Children* Sidoarjo hadir sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan anak jalanan, khususnya dalam memberikan fasilitasi pendidikan nonformal dan pendampingan sosial. Meskipun keberadaan komunitas tersebut belum dapat secara langsung menurunkan jumlah anak jalanan secara signifikan, proses yang dilakukan memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan akses pendidikan, membangun motivasi belajar, serta mengurangi keterlibatan anak dalam aktivitas jalanan. Pendekatan yang dilakukan melalui pendampingan rutin dan kegiatan edukatif memberikan alternatif aktivitas yang lebih positif bagi anak serta mendukung perkembangan sosial mereka. Dengan demikian, peran komunitas tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dalam mencegah anak semakin terjerumus dalam kehidupan jalanan.

Komunitas *Save Street Children* di Kabupaten Sidoarjo mengorientasikan programnya pada penyediaan akses pendidikan nonformal yang menyasar anak jalanan serta kelompok anak rentan putus sekolah. Kegiatan tidak hanya berupa pembelajaran dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga mencakup pendampingan psikososial, penguatan karakter, serta pelatihan keterampilan sederhana. Adapun kegiatan yang dimaksud di lapangan dan guna memberikan manfaat terhadap keberlanjutan dalam setiap proses pemberdayaan anak jalanan terdiri dari Kelas Merdeka sebagai ruang intensif untuk anak jalanan memperoleh ilmu pendidikan nonformal, Beasiswa Anak Merdeka, Piknik Asik sebagai sarana rekreasi edukatif, *Brave to Share* yang menumbuhkan budaya berbagi, Wirausaha Merdeka guna menanamkan jiwa kewirausahaan dalam anak. (Lestari & Mursyidah, n.d.) Melalui berbagai kegiatan tersebut, *Save Street Children* Sidoarjo bertujuan memberikan ruang belajar alternatif bagi anak jalanan agar tetap memperoleh akses pendidikan di tengah keterbatasan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi. Output dari kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dasar anak, membangun motivasi belajar, membentuk karakter sosial yang lebih positif, meningkatkan rasa percaya diri, serta mengurangi keterlibatan anak dalam aktivitas jalanan secara bertahap. Adapun penerima manfaat dari kegiatan ini meliputi anak jalanan, anak rentan putus sekolah, dan dari keluarga kurang mampu di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan yang dilaksanakan bersifat fleksibel, partisipatif, dan berbasis pendampingan sosial karena disesuaikan dengan kondisi sosial anak jalanan di lapangan. Kondisi sosial anak jalanan di Kabupaten Sidoarjo juga menunjukkan

karakteristik yang berbeda dengan anak jalanan di kota-kota besar yang cenderung lebih mandiri dan adaptif terhadap kehidupan jalanan. Anak-anak binaan di Kabupaten Sidoarjo umumnya berasal dari keluarga kurang mampu dan masih memiliki keterikatan dengan keluarga. Oleh karena itu, pendekatan pembinaan yang dilakukan lebih menekankan pada pendampingan sosial dan fasilitasi pendidikan nonformal. Pendekatan ini dilakukan karena sebagian besar anak masih memiliki keterikatan dengan keluarga, sehingga penanganan yang dilakukan lebih menekankan pada pendampingan dan pemberdayaan anak melalui berbagai kegiatan sosial dan pendidikan. Penyediaan akses pendidikan nonformal oleh komunitas ini direalisasikan melalui intervensi langsung terhadap anak-anak jalanan yang beraktivitas di berbagai lokus spesifik di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data komunitas *Save Street Children* Sidoarjo, anak binaan tersebar di dua lokasi utama, yaitu kawasan Alun-Alun Sidoarjo dan wilayah Candi. Berikut dilampirkan data jumlah anak binaan *Save Street Children* di Sidoarjo, sebagai berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Anak Jalanan Binaan Save Street Children Sidoarjo

Titik	Jumlah Anak Jalanan Binaan
Alun-Alun Sidoarjo	15 Anak
Candi	30 Anak

Sumber: (Komunitas *Save Street Children* Sidoarjo, 2025)

Berdasarkan data pada tabel 1.3 tersebut menunjukkan bahwa komunitas *Save Street Children* memiliki peran penting dalam menyediakan ruang pembelajaran alternatif bagi anak jalanan di Kabupaten Sidoarjo. Keberadaan wilayah pembinaan anak jalanan terdapat di dua titik wilayah Kabupaten Sidoarjo

yakni di Alun-Alun Sidoarjo dan Candi. Dua titik tersebut dipilih sebagai upaya dalam mengoptimalkan jangkauan dan efektivitas program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh komunitas. Kedua wilayah tersebut dinilai memiliki konsentrasi anak-anak dari kelompok masyarakat rentan yang cukup signifikan, sehingga memudahkan proses identifikasi, pendampingan, serta pembinaan secara berkelanjutan menunjukkan bahwa fenomena anak jalanan masih ditemukan di wilayah tersebut sehingga memerlukan upaya pendampingan yang berkelanjutan. Selain itu, sebagai lembaga yang bersifat independen *Save Street Children* Sidoarjo memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya, baik dari segi jumlah relawan, waktu pelaksanaan kegiatan, maupun dukungan pendanaan. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan cakupan wilayah intervensi agar program yang dijalankan dapat terlaksana secara lebih terarah dan berkesinambungan. Dengan demikian, pemusatan kegiatan pada wilayah tertentu tidak hanya bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan program, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak yang lebih nyata bagi anak-anak binaan. Namun demikian, tidak semua anak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara rutin karena sebagian dari mereka masih terlibat dalam aktivitas ekonomi di jalan atau membantu pekerjaan orang tua. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan anak jalanan melalui pendidikan nonformal masih menghadapi berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi keluarga dan lingkungan.

Apabila dibandingkan dengan data anak jalanan yang bersumber dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo pada periode tahun 2023–2025 yang menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah anak jalanan yang terdata secara administratif, data yang dihimpun oleh komunitas *Save Street Children* pada tahun 2024–2025 menunjukkan bahwa masih terdapat anak-anak yang terlibat dalam aktivitas jalanan dan mengikuti kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh komunitas. Perbedaan jumlah tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan sumber serta cakupan pendataan. Data dari Dinas Sosial merupakan data administratif yang diperoleh melalui pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sedangkan data dari *Save Street Children* merupakan data anak-anak yang secara langsung terlibat dalam kegiatan pembelajaran dan pendampingan komunitas. Dengan demikian, perbedaan data tersebut tidak menunjukkan adanya pertentangan, melainkan menggambarkan adanya perbedaan pendekatan dalam proses pendataan fenomena anak jalanan. Kondisi tersebut menunjukkan permasalahan anak jalanan tidak hanya berkaitan dengan proses pemberdayaan anak jalanan melalui pendidikan nonformal, namun dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi realitas keluarga serta lingkungan tempat anak-anak tersebut di lapangan. Oleh karena itu, keberadaan komunitas *Save Street Children* menjadi penting dalam memberikan ruang pembelajaran alternatif sekaligus melakukan pendampingan sosial bagi anak jalanan. Meski berbagai upaya pemberdayaan telah dilakukan, kajian secara khusus terkait proses pemberdayaan anak jalanan masih cenderung terbatas. Hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana proses pemberdayaan anak jalanan

melalui fasilitasi pendidikan nonformal yang dilakukan oleh komunitas tersebut di Kabupaten Sidoarjo.

Fenomena anak jalanan di Kabupaten Sidoarjo, juga berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo (2025) persentase penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 mencapai 4,53 persen atau sekitar 109 ribu jiwa. Realitas tersebut mengonfirmasi adanya kerentanan sosial yang berlapis, di mana anak-anak dari entitas keluarga dengan limitasi ekonomi memiliki kerentanan yang tinggi untuk putus dari sistem pendidikan. Sebagai akibatnya, kondisi ini mendorong mereka untuk beralih fungsi menjadi pelaku aktivitas ekonomi di lingkungan jalanan guna bertahan hidup. Adapun temuan tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan anak jalanan tidak hanya berkaitan dengan aspek pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dan lingkungan tempat tinggal anak. Lebih lanjut, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah menetapkan berbagai kebijakan, perlindungan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan, pendidikan, dan pengembangan diri serta terbebas dari eksploitasi sosial maupun ekonomi. Ketentuan ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam adanya perumusan kebijakan perlindungan anak di tingkat lokal. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak serta Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagai bentuk

implementasi kebijakan daerah. Dalam konteks ini, keberadaan Komunitas *Save Street Children* menjadi penting sebagai aktor non-pemerintah yang turut berperan dalam memberikan layanan pendidikan alternatif sekaligus pendampingan sosial bagi anak jalanan.

Penelitian Daini dan Arif (2023) menegaskan pemberdayaan anak jalanan dapat dilakukan melalui peran organisasi masyarakat atau komunitas sosial. Dalam penelitiannya, Komunitas Omah Dhuafa mendemonstrasikan upaya pemberdayaan melalui pendekatan holistik, seperti penyediaan fasilitas pendidikan, bimbingan belajar, pembinaan moral spiritual, serta pemberian motivasi dan pendampingan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan tersebut mampu membantu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran anak jalanan, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan sarana, tenaga pengajar, dan dukungan dari pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian (Rohim, 2025), Komunitas *Save Street Child* Surabaya terbukti bertindak sebagai agen penting dalam katalisasi pemberdayaan anak marginal. Mekanisme pemberdayaan ini dioperasionalkan lewat serangkaian program strategis, yang mencakup penyediaan layanan pendidikan di luar jalur formal, pelatihan keterampilan, serta pendampingan sosial. Program tersebut mampu membantu meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan anak marginal. Namun demikian, pelaksanaannya masih ditemukan keterbatasan, terlebih dalam aspek sumber daya manusia sehingga beberapa program pemberdayaan belum berjalan secara optimal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan anak jalanan melalui komunitas sosial masih menghadapi berbagai tantangan

dalam pelaksanaannya. Selain itu, (Afrita & Wahyudi, 2024) mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, serta rendahnya keterlibatan keluarga merupakan konstrain (hambatan) utama dalam inisiatif pemberdayaan berbasis komunitas. Meskipun penelitian pemberdayaan anak jalanan telah banyak dieksplorasi, tinjauan literatur menunjukkan bahwa mayoritas penelitian masih pada peran komunitas atau program pemberdayaan secara generalistik. Belum banyak penelitian yang secara spesifik menginvestigasi operasionalisasi pemberdayaan melalui jalur pendidikan nonformal oleh komunitas sosial pada tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Guna mengisi kebaruan (*novelty*) tersebut, esensi penelitian ini terletak pada upaya mengelaborasi secara mendalam proses fasilitasi pendidikan nonformal sebagai instrumen pemberdayaan anak jalanan oleh Komunitas *Save Street Children* Sidoarjo.

Berdasarkan kondisi di lapangan, masih terdapat kesenjangan antara tujuan ideal pemberdayaan anak jalanan dengan hasil nyata. Founder *Save Street Children* menyatakan, masih terdapat beberapa anak binaan yang kembali melakukan aktivitas di jalan meskipun telah mengikuti kegiatan pembelajaran nonformal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi keluarga serta rendahnya minat belajar anak. Berdasarkan pada data awal yang diperoleh melalui wawancara penelitian dengan Pendiri (*Founder*) Komunitas *Save Street Children* pada 8 Maret 2026:

“Beberapa anak masih kembali ke jalanan karena memang kondisi ekonomi keluarga yang belum stabil. Banyak kasus, anak merasa perlu membantu orang tua untuk mencari penghasilan sehingga mereka tetap turun ke jalan. Kondisi tersebut membuat kegiatan belajar belum sepenuhnya menjadi

prioritas bagi sebagian anak. Meskipun komunitas telah menyediakan kegiatan pembelajaran dan pendampingan, kenyataannya masih ada anak yang memilih kembali ke jalan karena adanya tuntutan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.” (Wawancara 08 Maret 2026).

Adapun faktor yang mempengaruhi kondisi di lapangan, dari pandangan orang tua yang kurang terhadap pendidikan, keterbatasan jumlah kontinuitas dari relawan serta kolaborasi yang terbatas dengan instansi daerah Seperti yang disampaikan dalam wawancara oleh *Founder Save Street Children* Sidoarjo pada 08 Maret 2026:

“Dalam kegiatan, memang ada beberapa hal yang sedikit berdampak dalam program. Jumlah relawan yang kebersamai kami juga terbatas karena sebagian besar merupakan volunteer. Program yang dijalankan *Save Street Children* juga bergantung pada dukungan anggaran dari beberapa instansi pemerintah, relawan, serta masyarakat yang peduli terhadap keberadaan anak jalanan. Tapi, masih ada juga sebagian orang tua yang bahkan belum sepenuhnya menyadari pentingnya pendidikan bagi anak sebagai salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan.” (Wawancara 08 Maret 2026).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa proses pemberdayaan anak jalanan tidak semata-mata berpusat pada peran komunitas semata, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti keterbatasan relawan, dukungan sumber daya, serta kesadaran keluarga terhadap pentingnya pendidikan bagi anak. Di sisi lain, fasilitas pendidikan nonformal yang disediakan oleh komunitas masih relatif sederhana dan sebagian besar bergantung pada dukungan donasi masyarakat. Kondisi ini menyebabkan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan belum sepenuhnya dapat berjalan secara berkelanjutan dan masih menyesuaikan dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Situasi tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan anak jalanan melalui fasilitasi pendidikan nonformal masih menghadapi berbagai tantangan dalam

pelaksanaannya. Namun, belum diketahui sejauh mana proses fasilitasi pendidikan nonformal yang dijalankan telah mencerminkan dimensi pemberdayaan secara utuh, yakni pemungkinan (*enabling*), penguatan (*empowering*), penyokongan (*supporting*), perlindungan (*protecting*), dan pemeliharaan (*maintaining*). Padahal, kelima dimensi tersebut merupakan satu kesatuan. Kondisi tersebut menunjukkan proses yang berjalan belum sepenuhnya mampu mengubah keterlibatan anak dalam konsistensi aktivitas di jalanan.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berupaya mendeskripsikan kegiatan yang dilakukan oleh komunitas, tetapi menganalisis secara mendalam bagaimana proses fasilitasi pemberdayaan anak jalanan melalui pendidikan nonformal tersebut dijalankan serta sejauh mana kegiatan tersebut mencerminkan dimensi pemberdayaan 5P. Dengan demikian diharapkan memberikan gambaran pemahaman yang komprehensif terkait efektivitas pemberdayaan anak jalanan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian akan menggunakan teori pemberdayaan masyarakat yang dirumuskan oleh Suharto (1997) dalam bukunya berjudul : Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Dengan indikator pemberdayaan 5P, pemungkinan (*enabling*), penguatan (*empowering*), penyokongan (*supporting*), perlindungan (*protecting*), dan pemeliharaan (*maintaining*). Menggunakan teori tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Fasilitasi Pendidikan Nonformal di Kabupaten Sidoarjo.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, rumusan masalah pada

penelitian adalah Bagaimana Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Fasilitasi Pendidikan NonFormal di Kabupaten Sidoarjo.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam proses Pemberdayaan Anak Jalanan melalui Fasilitasi Pendidikan Non-Formal di Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang terlampir, maka penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak, sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Save Street Children Sidoarjo merupakan komunitas yang aktif dalam proses fasilitasi dan pemberdayaan anak jalanan wilayah Kabupaten Sidoarjo. Melalui penelitian ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya peran serta dalam mendukung pendidikan non-formal bagi anak jalanan. Penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran publik tentang cara-cara efektif dalam memberikan dukungan sosial dan lingkungan yang inklusif bagi anak-anak yang kurang beruntung.

2. Bagi Kabupaten Sidoarjo

Penelitian ini diharapkan, menjadi instrumen evaluatif dan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah daerah serta lembaga sosial guna merumuskan kebijakan maupun program pemberdayaan anak jalanan yang berkesinambungan. Lebih lanjut, penelitian ini dapat menjadi landasan referensial dalam sinergitas kolaborasi antar komunitas, birokrasi pemerintah, dan elemen masyarakat demi mewujudkan

ekosistem lingkungan yang ramah anak di Kabupaten Sidoarjo.

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Secara teoretis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman, referensi akademik bagi para mahasiswa, dalam memahami praktik pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non-formal. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi contoh penerapan ilmu administrasi publik dalam kegiatan sosial di lapangan.